

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Badan Pusat Statistik Salatiga, 2018, *Kota Salatiga Dalam Angka 2018*, Putra Karya Offset, Salatiga;
- Bahder Johan Nasution, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung;
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian*, Media Press, Semarang;
- Dadang Kahmad, 2000, *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung;
- Dahwadin, dan Hasanudin, 2020, *Peradilan Agama di Indonesia*, CV. Mangku Bumi Media, Wonosobo;
- Djulaeka, dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya;
- Esmi Warassih, 2016, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang;
- Ganjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor;
- Harun M Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Jayus, 2019, *Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, CV. Jakad Publishing, Surabaya;
- Lexy J. Moleong, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung;
- M.A. Fattah Santoso, et al, 2010, *Studi Islam 3*, Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar (LPID) Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta;
- Marzuki, *Metodologi Riset*, 1983, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta;

- Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta;
- Pusat Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta;
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta;
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta;
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2000, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta;
- , 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Remadja Karya, Bandung;
- , 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Press, Jakarta;
- Tatang M. Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;

JURNAL

Ali Marwan Hsb & Evlyn Martha Julianthy, 2018, *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Legislasi Vol. 15 No.2- Juli 2018;

Iron Sarira, 2016, *Menghindari Formalitas Dalam Wajib Laporan Ketenagakerjaan*, Desember 2016;

Ni Wayan Winiarti, 2019, *Pelaksanaan Wajib Laporan Ketenagakerjaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus, Volume 4 No.1 April 2019;

Teguh Irianto, 2015, *Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan*, Jurnal Pakuan Law Review, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015.

Weny A Dunga & Abdul Hamid Tome, 2019, *Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi Gorontalo*, Jurnal Jambura Law Review, Volume 1, Januari 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Pemerintah Indonesia, 1953, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr.23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia*;

Pemerintah Indonesia, 2014, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Sekretariat Negara, Jakarta;

Pemerintah Indonesia, 2003, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Sekretariat Negara, Jakarta;

Pemerintah Indonesia, 1981, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan*, Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 39, Sekretariat Negara, Jakarta;

- Pemerintah Indonesia, 1981, ***Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan***, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 3201, Sekretariat Negara, Jakarta;
- Pemerintah Indonesia, 2010, ***Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan***, Sekretariat Negara, Jakarta;
- Kementerian Ketenagakerjaan, 2016, ***Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan***, Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1753 Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta;
- Kementerian Ketenagakerjaan, 2017, ***Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan***, Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1540, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Kementerian Ketenagakerjaan, 2019, ***Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan***, Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 463, Direktur Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta;
- Kementerian Ketenagakerjaan, 2017, ***Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 134 Tahun 2017***;
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2018, ***Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah***.
- Pemerintah Kota Salatiga, 2016, ***Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah***, Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Salatiga.

INTERNET DAN MEDIA MASSA:

Sofyan Hadi, Teori Kewenangan, www.academia.edu, diakses tanggal 3 Oktober 2020;

<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline>, diakses tanggal 29 Mei 2020;

<http://www.definisi-pengertian.com/2016/01/pengertian-data-definisi-menurut-ahli.html> diakses 10 mei 2020;

<https://pro.hukumonline.com/berita/baca/lt5cacb0d294161/ingat--ada-wajib-lapor-ketenagakerjaan-secara-online>;

Dimas Jarot Bayu, www.katadata.co.id, “Jokowi Tekankan Pentingnya Data Dalam Pembangunan”, diakses 10 Mei 2020.

<https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>, diakses 10 Mei 2020.

<https://www.jdih.kemnaker.go.id>. Diakses tanggal 2 Oktober 2020;

<https://www.merdeka.com>. Diakses tanggal 2 Oktober 2020;

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d40340a7981a/langgar-aturan-wajib-lapor-ketenagakerjaan--13-perusahaan-ini-kena-sanksi/>, diakses tanggal 1 Oktober 2020

<https://www.suaramerdeka.com/news/baca/19326/tak-laporkan-tenaga-kerja-kini-masuk-tipiring>, diakses tanggal 1 Oktober 2020.

ARTIKEL/LAPORAN/MAKALAH:

Razali Ritonga, *Kebutuhan Data Ketenagakerjaan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik;

Laporan, *Rapat Monitoring dan Evaluasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ungaran dan Disnakertrans Prov. Jateng*, November 2019;

Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang, 2020, *Laporan Triwulanan Tahun 2020, Permenaker Nomor PER.09/MEN/V/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan*;

Ses. Ditjen Binwasnaker & K3, *Kebijakan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Tahun 2017 dan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017*, Rapat Koordinasi Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Propinsi Jawa Tengah, Solo, April 2017;

Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga, 2016, *Laporan Triwulanan Tahun 2016 Permenaker Nomor PER.09/MEN/V/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan*;

Menteri Ketenagakerjaan, *Makalah Pengarahan Menteri Ketenagakerjaan dalam Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2015*, Jakarta;

Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang, 2020, *Laporan Triwulan Permenaker Nomor Per 09/MEN/V/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan*, Semarang

Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Salatiga, 2016, *Buku Register Wajib Laporan Ketenagakerjaan Tahun 2016*, Salatiga;

WAWANCARA/DISKUSI:

Agus Supriyanto, Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang, *Wawancara*, tanggal 15 Desember 2020;

Alma Cindy Permata, Petugas Administrasi Wajib Laporan Ketenagakerjaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Salatiga, *Wawancara*, tanggal 10 Desember 2020;

Ben Ismi Daradasih, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Salatiga, *Wawancara*, tanggal 10 Desember 2020;

Chusnun Ni'mah, Pengawas Ketenagakerjaan Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang, *Diskusi*, tanggal 15 Desember 2020;

Dadang Edy, Petugas Administrasi Wajib Laporan Ketenagakerjaan Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang, *Wawancara*, tanggal 15 Desember 2020;

Erry Dyah Nurhidayah, Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, *Diskusi pada Rapat Monev di MG Settos Semarang*, tanggal 14 Desember 2020;

-----, *Diskusi pada Rapat Monev di Hotel Patra Semarang*, tanggal 22 Desember 2020;

Gresa Sekardatun, Pengawas Ketenagakerjaan Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang, *Wawancara*, tanggal 19 Desember 2020;

Marwoto, Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Salatiga, *Wawancara*, tanggal 10 Desember 2020;

Riyanto, Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Salatiga, *Wawancara*, tanggal 15 Desember 2020;

Untung Budi Sasongko, Pengawas Ketenagakerjaan Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang, *Diskusi*, tanggal 15 Desember 2020.

